

ABSTRAK

Abstrak ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian istilah ASN dipersempit hanya dengan pengertian Pegawai Negeri saja tanpa pengaturan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) didalamnya. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tersebut kemudian diperluas dengan mengakui keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN.

Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukum

Sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan perekrutan adalah tidak transparansi proses penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan, masih ada tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kata kunci : ASN, Tes Wawasan Kebangsaan, Merit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan	8
1.5 Keaslian.....	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.7 Sistematika Penelitian	15
BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP MENGENAI TES WAWASAN KEBANGSAAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA.....	17

2.1	Pengertian Wawasan Kebangsaan	17
2.2	Tes Wawasan Kebangsaan.....	18
2.3	Pengertian Aparatur Sipil Negara	21
2.3.1	Kompetensi Pegawai ASN	23
2.3.2	Profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	24
2.4	Teori Kepastian Hukum	25
BAB III	PEMBAHASAN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN TES WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK MENYELEKSI CALON PEGAWAI ASN dan PELAKSANAANNYA SUDAH SESUAI DENGAN PERMENPAN No. 36 Tahun 2018	29
3.1	Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan untuk menyeleksi calon pegawai ASN dan PPPK.....	29
3.2	Kebijakan Hukum.....	36
3.3	Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan sesuai PERMENPAN No. 36 Tahun 2018	44
BAB IV	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	63